AJCE (Aceh Journal of Community Engagement)
e-ISSN: 2961-8444
journal.umuslim.ac.id/index.php/ajce
Vol 5 No 2 (August 2026), pp. 1 - 8

Training on Understanding, Capabilities, and Competencies for Cooperative Administrators in Central Aceh Regency

Azhari Azhari[1*], Mukhlis[2], Win Konadi[2], Haryani[2], Musrizal[2].
[1] FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen - Aceh
[2]FE Universitas Almuslim Bireuen – Aceh

*Corresponding author: Azhari, email: azharikuliah@gmail.com

DOI: 10.51179/ajce.v5i2.3677

Article history

Received:
Juli 10, 2026

Revised:
Juli 15, 2026

Accepted:
Agustus 2, 2026

***Key Word**: Strengthening Understanding, Ability, Competence*

© 2026 Oleh *authors. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE).* Artikel ini bersifat open access yang didistri-busikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

ABSTRACT: This community service initiative for cooperative administrators (specifically those of KDMP) was conducted to support the Central Aceh Regency Cooperative and MSME Agency's program aimed at strengthening administrators' competencies through training. The program sought to enhance understanding, skills, capacity, and competence regarding cooperative operations. Cooperatives play a strategic role in strengthening the community economy based on participation and the principle of kinship. Given that many cooperative managers and administrators in the regency have not yet reached their full potential due to limitations in managerial skills, governance understanding, and financial management, the training focused on capacity building—specifically targeting managers, chairpersons, and treasurers. The expected outcome was for participants to grasp the importance of good governance, transparency, accountability, and independence in cooperative management. Beyond technical improvements, the training fostered social bonds, collective responsibility, and community social capital. Emphasis was also placed on performance dynamics that create synergy among members, administrators, and supervisors, serving as a pathway to boost trust and the institutional effectiveness of the cooperatives.

ABSTRAK: Kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus Perkoperasian (khususnya KDMP) dilaksanakan sekaligus mendukung program Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah tentang penguatan kompetensi pengurus koperasi dalam bentuk pelatihan. Yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, kemampuan, kapasitas dan kompetensi perkoperasian. Koperasi berperan strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis partisipasi dan prinsip kekeluargaan. Mengingat masih banyak manager (dan pengurus) koperasi di kabupaten ini belum berkembang optimal karena keterbatasan manajerial dan pemahaman tata Kelola, juga tentang manajemen keuangan. Maka pelatihan diarahkan dalam upaya meningkatkan kapasitas pengurus, khususnya Manajer, Ketua dan Bendahara melalui pelatihan berbasis kapasitas dan kompetensi. Diharapkan dari pelatihan sebagai outputnya, peserta memahami pentingnya tata kelala yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan koperasi. Selain peningkatan teknis, pelatihan ini memperkuat *social bonding*, tanggung jawab kolektif, serta modal sosial masyarakat. Pengetahuan akan kinerja yang mensinergikan antara anggota, pengurus, dan pengawas ditekankan juga sebagai jalan dalam meningkatkan kepercayaan dan efektivitas kelembagaan koperasi yang akan dijalankan.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, masih banyak Lembaga perkoperasian menhadapai masalah dalam menjalankan. Baik dari sisi pengurus, ataupun ketidak aktifkan dan kepdulian anggota. Kita mendengar juga program koperas desa merah putih yang sedang dalam proses persiapan, banyak informasi dan issue yang di-*blunder*-kan di

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

masyarakat tentang program dan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang cenderung khawatir dan dicurigai berbasis politis, dan membuat repot aparatur dan masyarakat desa/keluruhan.

Sebagaimana dicetuskan oleh pemerintahan presiden ke-8, pada prinsipnya KDMP sebagaimana koperasi unit desa yang pernah ada. Merupakan program strategis nasional, untuk mendukung tumbah berkembangnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Menteri Koperasi, menekankan bahwa "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah program nasional untuk memodernisasi ekonomi pedesaan dengan menjadikan koperasi sebagai pusat layanan multifungsi (sembako, logistik, kesehatan). Dibentuk berdasarkan prinsip gotong royong, KDMP bertujuan memberdayakan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan warga. Didukung pemerintah, KDMP diharapkan menjadi agregator utama ekonomi desa.

Koperasi ini merupakan bagian dari program prioritas (Asta Cita) yang dirancang sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Kementerian Koperasi menegaskan KDMP hadir untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta mendorong fungsi koperasi yang lebih luas, tidak hanya simpan pinjam tetapi juga mengelola kios pangan, layanan logistik, hingga apotek desa.

Konkritnya, KDMP memiliki peran dan poin penting sehingga dapat mengelola gerai pangan (sembako murah), apotek desa, layanan logistik, dan pengelolaan hasil pertanian. Yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan/energi, menciptakan lapangan kerja, dan memberantas kemiskinan di desa. Sehingga pendirian atau perubahan anggaran dasarnya dapat dilakukan melalui sistem Ditjanu dengan pendampingan notaris, pendaftaran resmi dapat dilakukan melalui online melalui loink yang dibuat untuk itu.

Dalam operasional bisnis yang akan dijalankan, pengurus dengan anggotanya beserta warga desa setempat menghadapi tantangan dalam hitungan bisnis realistis, terutama terkait biaya operasional rutin (SDM, listrik, sistem) yang cukup besar. Dan yang pasti, untuk kelancarannya, harus memiliki kecakapan dan kemampuan menjalankan secara operasional didukung oleh pemerintah dan berfokus pada pendekatan ekonomi kerakyatan. Dukungan SDM untuk itu, dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, dan mengangkat manager juga instruktur ahli sebagai pendamping koperasi di desa ini.

Pengembangan SDM bagi suatu negara adalah suatu keniscayaan atau keharusan. Sebab pengembangan SDM adalah investasi negara yang akan menentukan kemajuan bangsa tersebut, kini dan di masa depan. Pengembangan itu dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politik dalam sebuah negara/daerah (Win Konadi *et al*., 2025).

Manajer dan Tenaga Ahli adalah pengelola profesional yang ditugaskan pemerintah untuk menggerakkan operasional harian, mengelola keuangan, dan memberdayakan unit usaha koperasi guna memperkuat ekonomi masyarakat tingkat desa. Manajer adalah posisi kunci dalam struktur koperasi, karena peran ini menjadi tulang punggung operasional harian koperasi desa. Jabatan ini menuntut profesionalisme tinggi karena bertugas sebagai motor penggerak aktivitas bisnis harian koperasi sekaligus memastikan pelayanan kepada anggota berjalan efektif dan transparan.

Sebagai unit bisnis lintas sektor dan program nasional, Koperasi Merah Putih dioperasikan oleh seseorang yang memiliki kecakapan untuk mengelola. Tujuannya agar target bisnis tercapai dan dapat menggerakkan perekonomian desa. Dengan begitu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya, yang perlu memahami tugas dan tanggung jawab yang jelas dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, bagian dari memberi pemahaman, kemampuan, kapasitas dan kompetensi perkoperasioan bagi pengurus koperasi, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga memberi pelatihan, dengan melibatkan naras sumber baik dari Lembaga koperasi (Dekopin) dan atau akademisi dari Universitas (Kampus). Karena, koperasi yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang kompeten. Melalui Program Pelatihan Tim Pengabdi membantu koperasi desa dalam membangun kinerja yang sinergi dari tim pengurus, pengawas, dan pengelola unit usaha yang profesional, transparan, dan siap menghadapi tantangan era digital. Dari keluaran pelatihan, pengurus dan kelembagaan Koperasi berperan strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis partisipasi dan prinsip kekeluargaan.

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

Biasanya, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi di desa dalam menguasai tata kelola, administrasi, keuangan, dan pengawasan internal. Kekurangan pemahaman ini berpotensi menimbulkan konflik internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta penyimpangan dalam manajemen (Hidayat & Samsi, 2025).

Dalam pedoman *International Cooperative Alliance* (ICA), koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kepemilikan bersama dan pengelolaan demokratis. Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat desa, koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan modal sosial masyarakat (Herdiyanti, 2024)

Kegiatan pelatihan berlangsung mulai 4 – 5 Mei 2026 di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah, untuk Ketua/Sekretaris dan Bendahara koperasi sejumlah 80 orang. Hari pertama sebanyak 40 desa dan lainnya dilakukan hari kedua (5/5/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah, Marwandi Munthe, ST., M.T, menjelaskan pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahamana, kemampuan dan kompetensi pengurus, mengingat sebagian besar koperasi masih baru terbentuk, juga menepis isu negatif yang blunder dimasyarakat.

Bahwa program Koperasi (KDMP) merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui semangat gotong royong. Koperasi ini adalah wadah strategis penggerak ekonomi desa. Keberhasilannya hanya dapat dicapai bila dikelola oleh SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas," tegas Kadis.

Maka, nantinya penting untuk kolaborasi lintas sektor serta diberikan pelatihan dalam memperkuat tata kelola koperasi, baik dari sisi manajemen, keuangan, maupun pengembangan usaha yang juga memastikan pengurus memiliki standar kemampuan, kapasitas dan kompetensi yang memadai. Sehingga melahirkan pengurus koperasi yang andal dan membawa koperasi dapat bermanfaat bagi desa, masyarakatnya, dan berdaya saing.

Kolaborasi komunitas menjadi strategi penting dalam memperluas jejaring bisnis dan menciptakan kepercayaan antara koperasi dan mitra eksternal (Miles & Huberman, 1994). Teori Modal Sosial menekankan pentingnya jejaring sosial (*social networks*), kepercayaan (*trust*), dan norma kerja sama (*reciprocity norms*) dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan pembangunan komunitas. Dalam pengelolaan koperasi, modal sosial menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antar anggota dan solidaritas sosial.

Lebih jauh, kolaborasi komunitas menjadi modal sosial yang penting dalam memperluas akses koperasi terhadap jaringan dan sumber daya eksternal. Melalui kegiatan bersama, pengambilan keputusan partisipatif, dan komunikasi yang terbuka, koperasi berhasil membangun identitas kolektif dan memperkuat kapasitas adaptifnya terhadap perubahan ekonomi digital. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kolaborasi berbasis komunitas dan edukasi pemasaran sosial merupakan elemen kunci dalam mentransformasi koperasi tradisional menjadi lembaga yang modern, kompetitif, dan menarik bagi investor (Pertiwi & Rahmawati. 2025).

Menurut Tjahjono *et al*., (2022), tingkat kepercayaan dan keterlibatan sosial antar anggota koperasi berpengaruh positif terhadap otonomi dan kinerja kelembagaan koperasi. Dengan demikian, modal social merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas koperasi berbasis komunitas.

Dan pelatihan juga menilai kapasitas pengurus mengelola koperasi yang Tangguh. Sebagaimana dalam *Capacity Building Theory*, menjelaskan proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan system sosial agar mampu mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan (Morgan, 2006).

Peningkatan kapasitas anggota koperasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis manajemen, tetapi juga mencakup kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan pasar (Kemenkop UKM, 2025).

Pradana et al, (2023) menegaskan bahwa pendekatan *capacity building* dalam pelatihan masyarakat pedesaan efektif meningkatkan kemampuan kelembagaan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

eksternal. Oleh karena itu, pelatihan calon pengurus dan pengawas koperasi merupakan implementasi nyata dari teori ini dalam konteks pengembangan organisasi berbasis komunitas.

METODE

Wilayah atau lokasi kegiatan pengabdian se-Kabupaten Aceh Tengah yang dikuti 80 pengurus Koperasi (KDMP). Dimana kegiatan dibagi dua sisi, hyakni tanggal 4 Mei – 5 Mai 2026 bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah.



Gambar 1. Pembukaan Acara Pelatihan diikuti Pengurus se-Aceh Tengah (4/5/2026)

Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar pengelolaan kelembagaan dan usaha di tingkat desa dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Program pelatihan diiinisiasi oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah yang melibatkankan dosen pengabdi dari Perguruan Tinggi (kampus UNIKI dan Umuslim Bireuen), sebagai naras umber sekaligus melaksanakan kegiatan Tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakagt.

Peserta pelatihan dipilih dan di undang khusus oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah, yakni manager/Ketua dan Bendahara serta utusan anggota Koperasi di desa-desa se-kabupaten Aceh Tengah yang dibagi dalam 2 (dua) sesi atau kelompok selama dua hari.

Pembekalan mengenai pemahaman dasar secara umum perkoperasian di sampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah (Marwandi Munthe, M.T.), sedangkan pemberian materi dalam kapasitas dan kompetensi pengelola KDMP disampaikan beberapa narasumber, yang di ketuai oleh Dr. Azhari, SE., M.Si Ak CA CPA.

Jelasnya, kegiatan pelatihan dalam rangka pengabdian masyarakat ini sekaligus membantu program Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Aceh Tengah, yang menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melalui *Forum Group Discussion* (FGD). Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pelatihan pemahaman, kemampuan, kapasitas dan kompetensi perkoperasian untuk bekal pengurus menjalankan Koperasi, dan peserta juga diberi modul untuk dipelajari diluar pelatihan.

Luaran Pengabdian Masyarakat ini akan publikasi di Jurnal AJCE (*Aceh Journal Of Community Engagement*) Almuslim.

HASIL PENGABDIAN

a). Hasil yang Dicapai:

Hasil *Forum Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan pada Koperasi Merah Putih memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi manajerial, semangat kewirausahaan, dan literasi digital para anggota koperasi.

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

Keterlibatan Dinas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah memberikan kontribusi besar terhadap semangat dan penguatan pada pengurus dan Lembaga koperasi desa merah putih tersebut.



Gambar 2. Narasumber/Pengabdi (Dr Azhari, SE. MSi dkk, memberi materi dan simulasi kepada peserta (Pengurus koperasi se-Aceh Tengah) pada 4-5 Mei 2026

Menurut Tjahjono *et al*. (2022), keberhasilan otonomi koperasi multipihak sangat bergantung pada kekuatan hubungan sosial antar anggota dan tingkat kepercayaan terhadap struktur organisasi. Hal ini tampak dalam pelatihan di yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta memperkuat solidaritas sosial sebagai dasar keberlanjutan koperasi.

Pelatihan dimulai dengan membedakan Prinsip Tata Kelola Koperasi dengan yang sebelumnya yang sudah ada di desa. Perbedaan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes misalnya, adalah dari fungsinya, meskipun keduanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, koperasi berfokus pada kepemilikan bersama oleh anggota dan prinsip demokrasi ekonomi, sementara BUMDes merupakan badan usaha milik pemerintah desa. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih peran, serta agar koperasi tetap menjadi wadah partisipasi ekonomi masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Pemberdayaan Masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal (A. Sururi & Hasanah, 2022).

Penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) menjadi fokus penting dalam pelatihan. Dasuki & Lestari (2019) menegaskan bahwa tata kelola koperasi yang baik melibatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) sebagai prinsip utama keberlanjutan organisasi. Prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) yang disampaikan dalam materi meliputi: (a) *Transparansi* – koperasi wajib menyampaikan informasi yang relevan kepada anggota, termasuk laporan keuangan, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan rencana strategis; (b) *Akuntabilitas* – setiap pelaku koperasi harus memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang jelas; (c) *Responsibilitas* – pelaksanaan kegiatan koperasi harus sesuai peraturan perundangan seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana lainnya; (d) *Independensi* – pengambilan keputusan harus bebas dari intervensi dan konflik kepentingan; (e) *Kewajaran (Fairness)* – seluruh anggota memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta menikmati hasil usaha secara adil.

Hasil pelatihan menunjukkan lebih 65% peserta mampu memahami, dan 35% kategori cukup memahami pentingnya keterbukaan informasi, pengambilan keputusan kolektif, serta pembagian hasil usaha yang adil sebagai bagian dari prinsip GCG. Penerapan prinsip GCG juga terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi. Seperti dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengawasan internal, dan laporan keuangan terbuka berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kredibilitas koperasi. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, pelatihan ini membentuk kesadaran akan pentingnya manajemen yang profesional dan berbasis nilai kejujuran sebagai pilar tata kelola modern.

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

Selain hasil peningkatan kemampuan, kapasitas dan komeptensi juga kolaborasi lintas sektor, *Forum Group Discussion* (FGD) pada pelatihan ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi strategis yang menjadi tindak lanjut, yakni:

1) Menegaskan dapat menjalankan unit gerai usaha untuk dikembangkan oleh Koperasi (KDMP) di Kabupaten Aceh Tengah, meliputi: Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis produksi dan Simpan Pinjam, Pengolahan dan pemasaran usaha masyarakat, ikut mengembangkan potensi daerah penghasil kopi nasional Gayo, Sistem Pergudangan-nya, *Cold Storage*, agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk bersubsidi.

(2). Potensi permasalahan yang perlu diantisipasi adalah apabila hasil analisis potensi desa dan potensi bisnis menunjukkan bidang usaha di luar unit gerai yang direkomendasikan. Hal ini berpotensi menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh persetujuan kredit dari pihak luar (Himbara, Bank, dll). Oleh karena itu, perlu disusun strategi alternatif pembiayaan dan skema permodalan lokal agar pengembangan KDMP tetap dapat berjalan.

b). Luaran yang dicapai:

Pelatihan menghasilkan luaran Pengabdian Masyarakat ini akan publikasi di Jurnal AJCE (*Aceh Journal of Community Engagement*) yang diterbitkan oleh LPPM Umuslim.

SIMPULAN

Pelatihan Koperasi Merah Putih Desa se-Kabupaten Aceh Tengah yang diinisiasikan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah melibatkan narasumber dan pengabdi dosen UNIKI dan Umuslim Bireuen, mampu meningkatkan kapasitas manajerial, tata kelola, dan solidaritas pengurus KDMP berbasis prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) untuk mendukung keberlanjutan koperasi, sesuai harapan dari presiden.

Keterlibatan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Aceh Tengah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan koperasi, diantaranya menginisiasi pelatihan, memberikan pendampingan, permantauan kesiapan pengurus dan memfasilitasi kebutuhan dasar berdirinya koperasi (khususnya KDMP).

Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan sinergi yang efektif, sehingga koperasi nantinya mampu membangun model koperasi dan usaha bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing desa. Termasuk mitra dalam menjalankan usaha bisnis dalam mempercepat pengembangan koperasi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat di desa.

Partisipasi aktif anggota dari masyarakat desa dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci sukses pengelolaan koperasi yang profesional dan inklusif.

Karena koperasi ini bersifat multipihak dipahami secara bersama semua peserta, akan mampu dan berhasil membangun kolaborasi lintas sektor dan memperkuat modal sosial sebagai fondasi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dian Lestari Subekti Pertiwi, Novita Rahmawati (2025). Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi Merah Putih Melalui Edukasi Pemasaran Sosial dan Kolaborasi Komunitas untuk Menarik Minat Nasabah dan Investor, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3(8), 4366-4370. https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

Herdiyanti, H. (2024). Social capital in sociological perspective: A systematic review of empirical studies in Indonesia (2000–2024). *Society*, 12(2), 1066–1076. https://doi.org/10.33019/society.v12i2.684

Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Pedoman Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: Kemenkop UKM.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis.* Thousand Oaks: Sage Publications.

e-ISSN: 2961-8444
Vol 5 No 2, August 2026

Morgan, P. (2006). *The concept of capacity. In Study on capacity, change and performance* (pp. 1–20).

Muhammad Taufiq Hidayat, Nur Samsi (2025). Training for Prospective Administrators, Supervisors, and Managers of the Red and White Dlanggu, Cooperative in Dlanggu Village, Mojokerto, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2), 814-828 - DOI: https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5325

Pradana, D. A., Suharto, R., & Rahmawati, N. (2023). Evaluating community training sustainability through capacity building approach in rural Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 7(2), 125–139. https://doi.org/10.21009/jpmm.072.05

Sururi, A., & Hasanah, B. (2022). Policy capacity and community empowerment as instruments of Indonesia's social development in the era of Covid-19 pandemic. *Jurnal Transformasi: Manajemen Pemerintahan*, 17(1), 65–78.

Tjahjono, A. F., Mashud, M., & Suaedi, F. (2022). Implementation of social capital for multipurpose cooperative autonomy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(1), 44. https://doi.org/10.20473/mkp.v35i12022.44-57

Win Konadi, Musrizal, Azhari, Kamaruddin, Rahmad (2025). *Penduduk & Pembangunan (Analisis Demografis dan Empiris)*, Cetakan ke-1, Medan; Penerbit CV. Merdeka Kreasi